2025

# RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Manggarai Timur

BUPATI MANGGARAI TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjalg Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
7 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 198);
8 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA PD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahzrn rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelengaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

## BAB II
## PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV : Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:
      1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
      2. Dinas Kesehatan ;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
      4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
      5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
      6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
      7. Dinas Sosial.
   b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
      1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
      2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
      3. Dinas Pangan dan Perikanan ;
      4. Dinas Pertanahan ;
      5. Dinas Lingkungan Hidup ;
      6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
      8. Dinas Perhubungan ;
      9. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      10. Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah ;

11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
   2. Sekretariat Dewan

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;

10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
11. Kecamatan Lamba Leda ; dan
12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1tercantum dalam Lampiran yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 2025
BUPATI MANGGARAI TIMUR,

YAGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
**NOMOR DPMPTSP.576/87.a/SK/VI/TAHUN 2025**
**TENTANG**
**PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas serta kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur.
b. bahwa mereka yang nama jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi tim penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 198).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 199)
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
14. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31.a Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II berdasarkan Renstra DPMPTSP;

2. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025;

3. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP;

4. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025;

5. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 dari masing-masing bidang di DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur;

6. Melaksanakan penyempurnaan Renja Perubahan Tahun 2025 DPMPTSP atas hasil telaahan, koreksi dan masukan dari masing-masing bidang di DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur;

7. Menyesuaikan dokumen rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 berdasarkan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan; dan

8. Menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 2 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

**DRS. ALEKSIUS RAHMAN**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19660906 199401 1 001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.576/87.a/SK/VI/TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025**

| No | Nama | Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs.Aleksius Rahman | Kepala DPMPTSP | Ketua |
| 2. | Sirilis S.Tanding, S.Pt | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | Sekretaris |
| 3. | Rikardus Burhan, SE | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | Anggota |
| 4. | Maria G.K.Arong, SS | Penata Perizinan Ahli Madya | Anggota |
| 5. | Lutgardis Marni Dedo, SS., M.Hum | Perencana Ahli Muda | Anggota |

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 2 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

**DRS. ALEKSIUS RAHMAN**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19660906 199401 1 001**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai Timur telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Tahun 2025.

Renja Perubahan ini dibuat dalam rangka pencapaian beberapa indikator kinerja kunci DPMPTSP yang disesuaikan dengan pendanaan berdasarkan kebutuhan DPMPTSP agar Tugas Pokok dan Fungsi PD ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dibutuhkan kritik dan saran demi perbaikan kinerja DPMPTSP sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Borong, 13 Agustus 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
**Kab. Manggarai Timur**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Drs. Aleksius Rahman**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19660906 199401 1 001**

# DAFTAR ISI

Perbup Renja .....

SK Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2025 DPMPTSP .....

Kata Pengantar .....i

Daftar Isi .....ii

Daftar Tabel .....iii

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1 Latar Belakang .....1

1.2 Landasan Hukum .....2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.4 Sistematika Penulisan .....4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2025 .....6**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP s/d Triwulan II Tahun 2025 .....6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....16

**BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DPMPTSP TAHUN 2025.....24**

**BAB IV PENUTUP.....31**

**LAMPIRAN.....**

Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembahasan Renja Perubahan Tahun 2025 (Forum Perangkat Daerah) DPMPTSP .....32

Formulir E70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah ..37

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan DPMPTSP Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II ..... 7

Tabel 2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II ..... 9

Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP selama 5 Tahun Terakhir (2020-2024) ..... 20

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025 & Perkiraan Maju Tahun 2026 ..... 25

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Implementasi Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan namun dibutuhkan perubahan strategi untuk pelaksananaan beberapa program/kegiatan lainnya yang tidak berjalan sesuai rencana karena situasi tertentu. Pertama, Pemerintah Pusat Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 telah menetapkan Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini berpengaruh kepada perubahan alokasi anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap prioritas belanja serta target capaian indikator kinerja program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025. Kedua, beberapa program dan kegiatan DPMPTSP tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana awal dan perlu diubah sesuai kondisi nyata di lapangan misalnya dari segi lokasi kegiatan dan jumlah personil yang terlibat. Ketiga, Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan secara sejalan dan terintegrasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029.

Menyikapi hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Renja DPMPTSP Tahun 2025 agar dapat menjawab kebutuhan pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan DPMPTSP sesuai perkembangan keadaannya sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 198).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 199)
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
14. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;

15. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31.a Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ini adalah;

1. Menyesuaikan dengan perubahan anggaran sesuai Instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2025 ;
2. Menyesuaikan perencanaan dengan kondisi terkini serta penyelarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 yang saat ini juga sedang dalam proses penyusunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 dapat mendukung secara langsung pencapaian visi, misi, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengapa disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang

dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dokumen Rancangan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Bab II memuat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP.

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab III menjabarkan tentang rincian program, kegiatan dan subkegiatan rancangan perubahan renja DPMPTSP Tahun 2025.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian Penutup dijelaskan mengenai catatan penting, kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut dari rancangan perubahan renja DPMPTSP Tahun 2025.

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
# KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
# SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

## 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur. Dari hasil evaluasi Renja (Rencana Kerja) DPMPTSP tersebut kemudian bisa mengetahui sejauh mana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Selain itu, evaluasi renja juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja, baik yang mendukung maupun yang menghambat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut akan ditampilkan tabel hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur keberhasilan kinerja pelayanan baik tujuan maupun sasaran yang tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Perangkat Daerah ini.

Berikut akan digambarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta capaian kinerja tersebut yang menggambarkan pelayanan DPMPTSP Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan DPMPTSP Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Capaian Renstra | | Realisasi Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp |
| 1. | Meningkatnya ekonomi masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal | | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan | 5% | Rp. 95.521.500 | 23% | Rp. 45.225.000 |
| 2. | | Meningkatnya investasi | Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan | 100 Milyar Rupiah | Rp. 95.521.500 | 58 Miliyar Rupiah | Rp. 45.225.000 |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Indeks Pelayanan Publik | 3,5 | Rp.174.732.300 | 3,2 | Rp.43.238.148 |
| 4. | | Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu | IKM Kinerja PTSP | 85 | Rp.174.732.300 | 88,96 | Rp.43.238.148 |

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan II, beberapa indikator kinerja telah melampaui target, khususnya pada pertumbuhan persentase investasi dan indeks kepuasan terhadap pelayanan PTSP. Namun, beberapa indikator lain masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait nilai investasi secara absolut dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perbaikan perencanaan dan strategi DPMPTSP dalam rangka pencapaian target Renstra secara lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah disebutkan di atas, DPMPTSP melaksanakan sejumlah program dan kegiatan dengan masing-masing indikator beserta targetnya pada tahun 2025. Tabel berikut menggambarkan secara rinci program dan kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan indikator kinerja masing-masing serta target dan realisasinya serta kerangka pendanaan sampai dengan triwulan II.

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6=5/4*100 | |
| | | | K | RP | K | RP | K | RP |
| **1** | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **Rp.1.941.170.379** | **50%** | **Rp.902.611.388** | **50%** | **46,50%** |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp.11.902.000** | **50%** | **Rp7.587.000** | **50%** | **63,75%** |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dok | Rp.5.190.000 | 1 dok | Rp.4.730.000 | 100% | 91,14% |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | Rp.500.000 | 1 dok | Rp.500.000 | 100% | 100% |
| 1.1.3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 dok | Rp.500,000 | 0 dok | Rp.0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | Rp.500.000 | 1 dok | Rp.500.000 | 100% | 10% |
| 1.1.5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | 1 dok | Rp.800.000 | 0 dok | Rp.0 | 0% | 0% |
| 1.1.6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dok | Rp.3.412.000 | 1 dok | Rp. 857.000 | 50% | 25,12% |
| 1.1.7 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dok | Rp.1.000.000 | 1 dok | Rp.1.000.000 | 100% | 100% |
| **1.2.** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp.1.767.371.279** | **50%** | **Rp.792.351.388** | **50%** | **44,83%** |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 org/bulan | Rp.1.669.349.879 | 18 org/6 bulan | Rp.753.247.338 | 50% | 45,12% |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 dok | Rp.98.021.400 | 1 dok | Rp.39.104,000 | 50% | 39,89% |
| **1.3.** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp.7.200.000** | **50%** | **Rp.3.000.000** | **50%** | **41,67%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.1** | **Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD** | **Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD** | **1 dok** | **Rp.7.200.000** | **1 dok** | **Rp.3.000.000** | **50%** | **41,67%** |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp.4.000.000** | **50%** | **Rp.2.708.000** | **50%** | **67,70%** |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 dok | Rp.4.000.000 | 1 dok | Rp.2.708.000 | 50% | 67,70% |
| **1.5** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp. 37.757.100** | **50%** | **Rp.26.687.100** | **50%** | **70,68%** |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Rp.22.432.000 | 1 Paket | Rp.1.719.000 | 50% | 65,62% |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Rp.10.325.100 | 1 Paket | Rp.8.118.100 | 50% | 78,62% |
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Rp.5.000.000 | 1 Laporan | Rp.3.850.000 | 50% | 77,00% |
| **1.6** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **Rp.16.680.000** | **50%** | **Rp.3.491.000** | **50%** | **20,93%** |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Rp.5.000.000 | 1 Laporan | Rp.2.384.000 | 50% | 47,68% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Rp.11.680.000 | 1 Laporan | Rp.1.107.000 | 50% | 9,48% |
| **1.7** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera** | **100%** | **Rp.96.260.000** | **50%** | **Rp.66.786.900** | **50%** | **69,38%** |
| 1.7.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 unit | Rp.71.140.000 | 7 unit | Rp.41.666.900 | 50% | 58,57% |
| 1.7.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | 1 unit | Rp.25.120.000 | 1 unit | Rp.25.120.000 | 100% | 100% |
| **2** | **Program pengembangan iklim penanaman modal** | **Jumlah Investor PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan** | **500 investor** | **Rp.23.936.500** | **168 investor** | **Rp0** | **34%** | **0%** |
| **2.1** | **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Peraturan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah** | **1 dok** | **Rp.23.936.500** | **0 dok** | **Rp.0** | **0%** | **0%** |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 dok | Rp.23.936.500 | 0 dok | Rp.0 | 0% | 0% |
| **3** | **Program Promosi Penanaman Modal** | **Persentase Investor dalam kegiatan promosi penanaman modal yang Menyatakan Minat berinvestasi** | **100%** | **Rp.6.585.000** | **50%** | **Rp.6.555.000** | **100%** | **99,54%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Event promosi investasi yang dilaksanakan** | **1 event** | **Rp.6.585.000** | **1 event** | **Rp.6.555.000** | **50%** | **99.54%** |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 dokumen | Rp.6.585.000 | 1 dokumen | Rp.6.555.000 | 50% | 99.54% |
| **4** | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | **Persentasase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan sesuai SOP** | **100%** | **Rp.144.564.800** | **50%** | **Rp.38.578.648** | **100%** | **26,69%** |
| **4.1** | **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Lama Proses Perizinan** | **5 Hari** | **Rp.144.564.800** | **1 Hari** | **Rp.38.578.648** | **100%** | **26,69%** |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 500 pelaku usaha | Rp.144.564.800 | 577 Pelaku usaha | Rp.38.578.648 | 18% | 26,69% |
| 5 | **Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal** | **Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **100%** | **Rp.65.000.000** | **21%** | **Rp.38.670.000** | **22%** | **59,49%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pelaku usaha yang melaporkan realisasi kegiatan penanaman modal (KLPM)** | **125 Pelaku usaha** | **Rp.46.911.000** | **36 Pelaku Usaha** | **Rp.38.670.000** | **22%** | **82,43%** |
| 5.1.1 | Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 170 kegiatan usaha | Rp.28.670.000 | 170 kegiatan usaha | Rp.10.000.000 | 100% | 100% |
| 5.1.2 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha | 0 pelaku usaha | Rp.0 | 0 pelaku usaha | Rp.0 | 0% | 0% |
| 5.1.3 | Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 170 kegiatan usaha | Rp.28.700.000 | 170 kegiatan usaha | Rp.28.670.000 | 100% | 99,90% |
| **4** | **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola** | 100% | Rp.30.167.000 | 100% | Rp.4.659.500 | 100% | 15,45% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang diolah** | **1 dok** | **Rp.30.167.000** | **1 dok** | **Rp.4.659.500** | **100%** | **15,45%** |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 dok | Rp.30.167.500 | 1 dok | Rp.4.659.500 | 100% | 15,45% |

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP di atas, capaian kinerja DPMPTSP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sebagian besar subkegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 68% dan realisasi keuangan 41%. Selanjutnya, hampir seluruh program inti urusan penanaman modal juga telah dilaksanakan yakni Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan 100%, Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi fisik 27% dan realisasi keuangan 50%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi fisik 22% dan realisasi keuangan 59% serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 15,32%.
2. Sampai dengan triwulan II Tahun 2025, ada satu program yang belum memenuhi target karena belum dijalankan sama sekali yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota). Hal ini karena ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan demi kelancaran pelaksanaan subkegiatan ini terutama yang berkaitan dengan lokasi kegiatan dan pihak yang terlibat.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur dibentuk pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2010 dengan nomenklatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Selanjutnya, pada tahun 2013 diubah nomenklaturnya menjadi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMDP2T) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2016, lembaga ini kembali

mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 tahun 2023: "DPMPTSP yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah."

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, maka fungsi yang diemban DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur adalah:

a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
b. Melaksanakan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Melaksanakan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
e. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan DPMPTSP;
f. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP);
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, DPMPTSP didukung oleh sumber daya aparatur dengan struktur organisasi sebagai berikut.

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
    1. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Subkoordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi;

3. Subkoordinator Substansi Keuangan.

c. Koordinator Substansi Penanaman Modal membawahi kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
    1. Subkoordinator Substansi Penanaman Modal;
    2. Subkoordinator Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
    3. Subkoordinator Substansi Deregulasi Penanaman Modal;
    4. Subkoordinator Substansi Promosi dan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
    5. Subkoordinator Substansi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
    6. Subkoordinator Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
    7. Subkoordinator Substansi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

d. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
    1. Subkoordinator Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
    2. Subkoordinator Substansi Verifikasi, Analisis dan Penerbitan Izin;
    3. Subkoordinator Substansi Pelayanan Informasi Perizinan.

Dengan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maupun sarana dan prasarana atau aset yang dimiliki oleh DPMPTSP, perangkat daerah ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada Kelompok sasaran layanan yang mencakup pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah ini, khususnya dalam hal perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal. Kelompok sasaran dimaksud antara lain:

1. Pelaku Usaha yang di dalamnya termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Perusahaan Swasta (nasional maupun asing), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), BUMN dan BUMD yang berinvestasi di Manggarai Timur dengan kebutuhan utamanya adalah

kemudahan perizinan berusaha, informasi peluang investasi, dan fasilitasi insentif investasi.

2. Calon Investor Perorangan atau badan usaha yang belum beroperasi namun memiliki minat menanamkan modal di Manggarai Timur termasuk investor lokal, nasional, maupun luar negeri dengan kebutuhan utamanya adalah informasi potensi investasi, dukungan promosi, dan pendampingan perizinan awal.
3. Masyarakat Umum yakni seluruh warga yang memerlukan pelayanan perizinan dengan kebutuhan utamanya adalah akses mudah terhadap layanan perizinan dan kejelasan prosedur.
4. Perangkat Daerah Teknis yang terkait langsung dalam proses teknis perizinan dan pelayanan dengan kebutuhan utamanya adalah integrasi sistem pelayanan, koordinasi teknis, serta sinkronisasi data dan rekomendasi teknis.
5. Tenaga Kerja Lokal adalah Masyarakat Manggarai Timur yang memperoleh manfaat dari investasi melalui pembukaan lapangan kerja dengan kebutuhan utamanya penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk serta perlindungan ketenagakerjaan.
6. Instansi Vertikal dan Lembaga Terkait Seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, Kepolisian, dan lembaga pengawasan seperti Ombudsman dengan kebutuhan utamanya pelaporan kinerja pelayanan, kepatuhan terhadap standar nasional, dan koordinasi lintas lembaga.

Selanjutnya, berikut akan digambarkan kinerja pelayanan DPMPTSP selama 5 tahun terakhir (2020-2024). Kinerja pelayanan dimaksud menggambarkan target rencana kinerja yang dibuat dikomparasikan dengan realisasi pencapaian rencana tersebut.

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP selama 5 Tahun Terakhir (2020-2024)

| No. | Uraian | Satuan | Rumus | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **SASARAN RENSTRA** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN | % | Nilai investasi tahun n – Nilai investasi tahun n-1 / Jumlah investasi Tahun n-1 x100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -67,4 | 143,6 | -9,41 | 59,41 | -18,77 |
| 2. | IKM DPMPTSP | Nilai | Jelas | 76,61 - 88,30 | 76,61 - 88,30 | 76,61 - 88,30 | 76,61 - 88,30 | 88,31 - 100.00 | 90 | 87 | 80 | 87 | 85 |
| 3. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai | Jelas | 3,01-3,50 | 3,01-3,50 | 3.01 - 3,50 | 3,51 - 4.00 | 4.01 - 4.50 | 2,95 | 3,2 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| | **OUTCOME PROGRAM** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Investor PMA dan PMDN | Orang | Jelas | 145 | 154 | 164 | 174 | 184 | 80 | 297 | 407 | 1039 | 1633 |
| 2. | Jumlah Investor Yang Menyatakan Minat Dalam Promosi | Orang | Jelas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Rata-Rata Lama Proses Perzinan | Hari | Total Hari Pelayanan Seluruh Izin/Total izin yang dilayani | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 4. | Total Nilai Realisasi Investasi | Rupiah | Jelas | 200 Milyar | 893 Milyar | 937 Milyar | 984 Milyar | 1 Triliun | 29 Milyar | 72 Milyar | 65 Milyar | 104 Milyar | 85 Milyar |
| 5. | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada | % | Jumlah Tenaga kerja lokal Yang diberdayakan/ Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Investasi diKabupaten Manggarai Timur | | seluruh tenaga kerja pada kegiatan investasi x 100% | | | | | | | | | | |
| 6. | Persentase PD Teknis yang terintegrasi dalam OSS | % | PD Teknis yang terintegrasi dalam OSS/Total seluruh PD Teknis X 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP di atas menunjukkan hasil sebagai berikut:

**1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA dan PMDN)**

Target pertumbuhan nilai investasi setiap tahun ditetapkan sebesar 5%. Namun, realisasi capaian mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi tajam sebesar -67,4%, mencerminkan penurunan drastis nilai investasi akibat dampak pandemi COVID-19 dan melemahnya minat investasi global. Tahun 2021 menunjukkan lonjakan positif hingga 143,6%, menandakan adanya pemulihan dan meningkatnya kepercayaan investor. Namun, tren kembali menurun pada tahun 2022 sebesar -9,41%, meningkat lagi pada 2023 sebesar 59,41%, dan turun kembali pada tahun 2024 menjadi -18,77%.

Secara umum, kinerja indikator ini menunjukkan ketidakstabilan iklim investasi, dipengaruhi oleh faktor eksternal (ekonomi nasional dan global) serta kesiapan proyek investasi di Manggarai Timur.

**2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik mengalami peningkatan positif dari 2,95 (2020) menjadi 3,58 (2022) dan stabil hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan, terutama dalam aspek kecepatan, kemudahan, dan kepastian prosedural. Sementara itu, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama periode Renstra berada dalam kategori baik, meskipun mengalami penurunan dari 90 (2020) menjadi 80 (2022), sebelum kembali naik ke 87 (2023) dan sedikit menurun di 85 (2024). Fluktuasi ini menjadi indikator penting perlunya peningkatan konsistensi dalam pelayanan publik. Hal ini erat kaitannya dengan pembentukkan Mall Pelayanan Publik Manggarai Timur pada tahun 2023 yang memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dari sisi integrasi layanan serta Peningkatan Kecepatan dan Kepastian Waktu Layanan. Selain itu penerapan digitalisasi pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2020 juga secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (perizinan) di Kabupaten Manggarai Timur.

**3. Efisiensi Layanan Perizinan**

Target nilai IKM meningkat setiap tahun dengan kisaran 76,61–100, menunjukkan arah perbaikan pelayanan publik. Realisasi capaian berada pada kisaran 80–90, di mana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 (90), dan sempat menurun pada 2022 menjadi 80. Meskipun terjadi fluktuasi, nilai IKM tetap berada dalam kategori "Baik", menandakan bahwa pelayanan DPMPTSP cukup memuaskan masyarakat, walaupun masih diperlukan peningkatan kualitas terutama konsistensi pelayanan prima di seluruh lini perizinan.

**4. Pertumbuhan Jumlah Investor**

Jumlah investor (PMA dan PMDN) meningkat drastis dari hanya 80 orang pada 2020 menjadi 1.633 orang di tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan keberhasilan DPMPTSP dalam menjangkau dan menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Manggarai Timur. Namun, jumlah investor yang menyatakan minat selama kegiatan promosi masih rendah, hanya 1–3 orang per tahun, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi promosi investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**5. Realisasi Investasi dan Dampaknya terhadap Tenaga Kerja**

Total nilai realisasi investasi mengalami dinamika serupa dengan pertumbuhan investasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp104,9 miliar, dan terendah di tahun 2022 sebesar Rp65,8 miliar. Namun, yang patut diapresiasi adalah bahwa seluruh tenaga kerja yang diserap berasal dari tenaga kerja lokal (100%), yang meningkat dari 295 orang pada 2020 menjadi 2.576 orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

**6. Integrasi Layanan Melalui OSS**

Dalam hal transformasi digital pelayanan, DPMPTSP berhasil mengintegrasikan semua PD teknis yang relevan (10 PD) ke dalam sistem OSS sejak tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa instansi teknis utama yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan telah berada dalam ekosistem pelayanan digital nasional.

# BAB III

# RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025 DPMPTSP

Bab ini memuat rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyesuaian atas dinamika kebijakan, kondisi pembangunan daerah, dan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Perubahan ini difokuskan untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, efektif dalam mendorong peningkatan investasi, serta optimal dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pendanaan dialokasikan secara efisien dengan mengutamakan kegiatan strategis yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel 3.1 yang menggambarkan rumusan rencana kerja perubahan DPMPTSP Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. MANGGARAI TIMUR
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **2.609.006.136,00** | **2.361.727.452,00** | **2.193.335.179,00** | **-415.670.957,00** | | | | | | | **2.763.800.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.609.006.136,00** | **2.361.727.452,00** | **2.193.335.179,00** | **-415.670.957,00** | | | | | | | **2.763.800.000,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **2.609.006.136,00** | **2.361.727.452,00** | **2.193.335.179,00** | **-415.670.957,00** | | | | | | | **2.763.800.000,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota** | | | | **100 %D** | **100 %D** | **1.937.050.236,00** | **1.991.260.652,00** | **1.953.246.379,00** | **278.149.764,00** | | | | | | | **2.215.200.000,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.800.000,00 | 15.428.000,00 | 11.902.000,00 | 7.102.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 8.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 4.690.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 6.938.000,00 | 3.412.000,00 | 2.412.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.791.918.736,00 | 1.801.261.552,00 | 1.766.021.279,00 | -25.897.457,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 2.090.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.703.240.116,00 | 1.703.240.152,00 | 1.669.349.879,00 | -33.890.237,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.678.620,00 | 98.021.400,00 | 96.671.400,00 | 7.992.780,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 90.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 7.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 7.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 500.000,00 | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 26.191.500,00 | 47.431.100,00 | 53.183.100,00 | 26.991.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 38.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.191.500,00 | 22.432.000,00 | 29.432.000,00 | 9.240.500,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 19.999.100,00 | 15.251.100,00 | 11.251.100,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.500.000,00 | 6.500.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 3.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 10.180.000,00 | 16.680.000,00 | 14.680.000,00 | 4.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 10.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 3.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.180.000,00 | 11.680.000,00 | 8.180.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 7.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 96.260.000,00 | 96.260.000,00 | 96.260.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | DPMPTSP | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 71.140.000,00 | 71.140.000,00 | 71.140.000,00 | 0,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.120.000,00 | 25.120.000,00 | 25.120.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Investor PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan** | | | | **500 Investor** | **500 Investor** | **50.000.000,00** | **80.253.000,00** | **23.936.500,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | **51.000.000,00** | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Peraturan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 50.000.000,00 | 80.253.000,00 | 23.936.500,00 | -26.063.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | Pelaku Usaha | | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 80.253.000,00 | 23.936.500,00 | -26.063.500,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Investor dalam kegiatan promosi penanaman modal yang Menyatakan Minat berinvestasi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **30.000.000,00** | **38.430.000,00** | **6.585.000,00** | **600.000,00** | | | | | | | **30.600.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Event promosi investasi yang dilaksanakan* | | | | 1 Event | 1 Event | 30.000.000,00 | 38.430.000,00 | 6.585.000,00 | -23.415.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | Pelaku Usaha | | 30.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 38.430.000,00 | 6.585.000,00 | -23.415.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 30.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan sesuai SOP** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **186.694.900,00** | **156.373.800,00** | **132.488.800,00** | **119.305.100,00** | | | | | | | **306.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Lama Proses Perizinan* | | | | 5 Hari | 5 Hari | 186.694.900,00 | 156.373.800,00 | 132.488.800,00 | -54.206.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | Pelaku Usaha | | 306.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 500 Pelaku Usaha | 500 Pelaku Usaha | 186.694.900,00 | 156.373.800,00 | 132.488.800,00 | -54.206.100,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 306.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **397.530.000,00** | **65.000.000,00** | **46.911.000,00** | **-287.530.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 397.530.000,00 | 65.000.000,00 | 46.911.000,00 | -350.619.000,00 | | | - | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | Pelaku Usaha | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 10 Kegiatan Usaha. | 10 Kegiatan Usaha. | 86.495.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -76.495.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 200 Pelaku Usaha | 200 Pelaku Usaha | 163.726.000,00 | 25.000.000,00 | 8.211.000,00 | -155.515.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 170 Kegiatan Usaha | 170 Kegiatan Usaha | 147.309.000,00 | 30.000.000,00 | 28.700.000,00 | -118.609.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diolah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **7.731.000,00** | **30.410.000,00** | **30.167.500,00** | **43.269.000,00** | | | | | | | **51.000.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang diolah* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 7.731.000,00 | 30.410.000,00 | 30.167.500,00 | 22.436.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | Pelaku Usaha | | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.731.000,00 | 30.410.000,00 | 30.167.500,00 | 22.436.500,00 | Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik | | | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **2.609.006.136,00** | **2.361.727.452,00** | **2.193.335.179,00** | **-74.176.079.881,00** | | | | | | | **2.763.800.000,00** | |

# BAB IV
# PENUTUP

Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan dinamika kebijakan, kondisi aktual, serta hasil evaluasi kinerja. Pelaksanaannya memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pihak agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal, mendukung peningkatan investasi, penyederhanaan pelayanan perizinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur ini dibuat untuk dijadikan Pedoman dalam Perubahan Rencana kerja pada Tahun Anggaran 2025.

Borong, 13 Agustus 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur,**

**(Drs. Aleksius Rahman)**
**Pembina Utama Muda**
**NIP.19660906 199401 001**

**BERITA ACARA**
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH**
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025**
**DINAS PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Pada hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi Rancangan Renja Perubahan oleh Bapak Drs. Aleksius Rahman selaku ketua tim penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua tim Penyusunan Renja Perubahan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 2 Juni 2025
J a m : 14.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Manggarai Timur
Forum Perangkat Daerah : DPMPTSP Kab. Manggarai Timur

**MENYEPAKATI**

KESATU : Program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

KEDUA : Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;

KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur ini; dan

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Borong, 2 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

**DRS. ALEKSIUS RAHMAN**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19660906 199401 1 001**

MENYETUJUI,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur:

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Sirilus S. Tanding, S.Pt | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | |
| 2. | Rikardus Burhan, SE | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | |
| 3. | Maria G.K.Arong, SS | Penata Perizinan Ahli Madya | |

**LAMPIRAN I :**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DPMPTSP KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**TANGGAL : 2 Juni 2025**

**Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah**
**Dinas Penanaman Modal**
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
**Kabupaten Manggarai Timur**

**Tanggal : 2 Juni 2025**

**Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Manggarai Timur**

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs.Aleksius Rahman | Kepala Dinas | |
| 2. | Sirilus S. Tanding,S.Pt | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | |
| 3. | Rikardus Burhan,SE | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya | |
| 4. | Maria G.K.Arong, SS | Penata Perizinan Ahli Madya | |
| 5. | Edil Walti Ndua, SE | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | |
| 6. | Lutgardis Marni Dedo, SS.,M.Hum | Perencana Ahli Muda | |
| 7. | Hesti Puspita, ST | Kasubag Kepegawaiam dan Umum | |
| 8. | Laurensius Kalis,SP | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 9. | Merlina Sigi,S.KM | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 10. | Hendrikus Nam | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 11. | Valentina E. Dor, S.Sos | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 12. | Fransiskus E.Daman,SE | Penata Perizinan Ahli Muda | |
| 13. | Marsianus Dampung,S.TP | Penata Perizinan Ahli Muda | |
| 14. | Siska Nindia, S.Sos | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 15. | Elisabet Novita Tegol, S.Pt | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |
| 16. | Maria A.K.Manti,A.Md | Analis Kebijakan Umum | |
| 17. | Arnolus Adu, S.Tr.IP | Analis Kebijakan Umum | |

**LAMPIRAN II :**
**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DPMPTSP KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Diskusi Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Target Sasaran dan Target Program Renja Perubahan Tahun 2025**

**Target Indikator Kinerja Renja Perubahan Tahun 2025**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target RKPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Induk | Perubahan |
| 1. | Meningkatnya ekonomi masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal | | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan | 5% | 5% |
| 2. | | Meningkatnya investasi | Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan | 100 Milyar Rupiah | 100 Milyar Rupiah |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Indeks Pelayanan Publik | 3,5 | 3,5 |
| 4. | | Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu | IKM Kinerja PTSP | 85 | 85 |

**Target Program Renja Perubahan Tahun 2025**

| Kode Program | Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Target RKPD 2025 | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Induk | Perubahan | |
| | NON URUSAN | | | | |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | SEKRETARIS |
| 2.18 | Penanaman Modal | | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan | 500 investor | 500 investor | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase investor dalam kegiatan Promosi penanaman modal yang menyatakan minat berinvestasi | 100% | 100% | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 100% | 100% | PENATA PERIZINAN AHLI MADYA |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 100% | 100% | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang diolah | 100% | 100% | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA |

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perubahan Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | √ | | | |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | √ | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 4. | Mengkaji hasil evaluasi renja induk -Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 5. | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 6. | Penelaahan rancangan awal RKPD Perubahan kabupaten/kota. | √ | | | |
| 7. | Perumusan tujuan dan sasaran | √ | | | |
| 8. | Penelaahan usulan masyarakat. | √ | | | |
| 9. | Perumusan kegiatan prioritas. | √ | | | |
| 10. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | . |
| 10.a | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. | √ | | | |
| 10.b | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan | √ | | | |
| 10 d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | √ | | | |
| 12 | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |

Borong, 21 Agustus 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur,**

**(Drs. Aleksius Rahman)**
**Pembina Utama Muda**
**NIP.19660906 199401 001**